

EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SANTI SILFIANI

NASYIAH HASANAH PURNOMOWATI (nhpwati@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine how the implementation of Regional Management Information System (SIMDA) of Finance at the Government of Magelang Regency, the obstacles in implementing SIMDA of Finance, and the effectiveness of financial reporting before and after the implementation of SIMDA of Finance. This type of research is study case qualitative research. The object of this research is the Magelang Regency Government, with the research samples being 11 Regional Working Unit in the Magelang Regency. This research shows that the implementation of SIMDA of Finance at the Magelang Regency Government has been following existing procedures. Constraints in implementing SIMDA of Finance at the Magelang Regency Government include lack of human resource knowledge, network/connection problems, hardware/hardware problems, and software/software problems. However, the implementation of SIMDA of Finance increases the effectiveness of financial reporting compared to before the SIMDA of Finance implementation. As a result, the quality of the financial reports is higher than before the implementation of SIMDA of Finance.

Keywords: *implementation of SIMDA of Finance, effectiveness of financial reporting, quality of financial reports*

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), kendala dalam implementasi SIMDA Keuangan, dan efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus. Objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dengan sampel penelitian yaitu 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kendala dalam implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya kurangnya pengetahuan SDM, masalah jaringan/koneksi, masalah pada *hardware*/perangkat keras, dan masalah pada *software*/perangkat lunak. Implementasi SIMDA Keuangan meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daripada sebelum implementasi SIMDA Keuangan. Akibatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas daripada sebelum implementasi SIMDA Keuangan.

Kata kunci: implementasi SIMDA Keuangan, efektivitas pelaporan keuangan, kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Teknologi informasi diperlukan dalam mengelola keuangan daerah. Teknologi informasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Teknologi informasi berperan dalam mengembangkan informasi dan proses integrasi agar berjalan dengan baik (Aben, Valk, Roehrich & Selviaridis, 2021). Pengembangan teknologi informasi perlu bagi pemerintah agar pemerintah dapat

dengan mudah untuk menjalankan, mengoperasikan, dan mendayagunakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat (Dewi & Mariska, 2018). Menurut Lestari & Dewi (2020), sistem informasi akuntansi merupakan komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi akuntansi penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena

akuntansi merupakan alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepentingan publik (Saerang, Wokas, Kumaat & Datu, 2019). Tujuan penting akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Handayani & Erlina, 2020). Akuntabilitas yang bagus diperlukan agar organisasi publik dinilai memiliki manajemen kinerja yang baik (Widajatun & Kristiastuti, 2020). Menurut Liou & Hu (2018), teknologi dan manajemen publik memberikan pengaruh luas dan akan terus mengubah operasi organisasi sektor publik dan kinerja manajemen. Teknologi deterministik dan non-teknologi telah banyak digunakan untuk mengeksplorasi mengenai manajemen keuangan sektor publik (Simpson, Tetteh & Boateng, 2020). Peraturan yang mengatur mengenai teknologi informasi pada pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut yaitu dengan pengimplementasian suatu teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sehingga dapat memperoleh kemudahan.

Perbedaan peraturan dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah kota dan kabupaten merupakan tantangan untuk menyatukan sistem informasi manajemen keuangan kota dan kabupaten (Apridiyanti, Suharman & Ardianto, 2020). Saat ini pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota bersama-sama menerapkan suatu sistem informasi dalam mengelola data keuangannya. Sistem informasi yang diterapkan tersebut yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SIMDA merupakan suatu sistem untuk mengelola keuangan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). SIMDA dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya baik di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) maupun SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Menurut Sugi-yantari, Titisari & Sumani (2018), SIMDA menjadikan pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. Menurut Kring & Grimes (2019), tersedianya kapabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang semakin besar akan meningkatkan fungsi sistem. Faktor yang memengaruhi implementasi SIMDA diantaranya keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan konsultan, lokasi bagian sistem informasi, komitmen organisasi, dan motivasi (Anggraini, 2019).

Menurut Rahmawati & Suryadi (2019), efektivitas merupakan hasil dari atau efek yang dijadikan ukuran untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas merupakan proses di mana rencana dan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah orang yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan (Andjani, Ratnamulyani & Kusumadinata, 2018). Efektivitas menurut Campbell (1989:121) merupakan suatu tingkatan yang telah ditetapkan oleh entitas dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, entitas atau lembaga perlu mengukur efektivitas. Efektivitas diukur dengan teori dari Campbell (1989:121) mengemukakan bahwa dengan keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh merupakan cara yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas.

Laporan keuangan berisi informasi keuangan yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) merupakan wujud kewajiban pemerintahan atas pengelolaan sumber daya yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam 1 (satu) masa (Wanti & Susilo, 2020). Setiap entitas pelaporan wajib mempublikasikan keuangannya tersebut termasuk diantaranya pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Sumtaky, Chandrarin & Sanusi (2018), pemerintah

daerah harus memberikan kualitas publik yang baik agar dinilai memiliki kinerja yang baik oleh masyarakat. LKPD yang berkualitas akan mendukung *user* sebagai bahan untuk melakukan analisis. Menurut Thoa & Nhi (2021), kualitas informasi akuntansi memengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan warga. Menurut Ikyarti & Aprilia (2019) semakin bagus implementasi SIMDA maka semakin baik pada kualitas laporan keuangan yang disajikan. Teori *stewardship* menjelaskan, bagi prinsipal dengan adanya SIMDA dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dan dapat menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga dapat menyampaikan informasi keuangan kepada pelayanan publik dengan cepat dan akurat (Donaldson & Davis, 1991). Implementasi SIMDA selain berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan juga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa informasi akuntansi. Update *software* penyedia jasa laporan keuangan yang lebih canggih penting demi peningkatan kepuasan atas pengguna jasa informasi ke depan (Ishak, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, LKPD disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Syarat kualitatif laporan agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang dapat dibilang baik. Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama empat tahun berturut-turut mulai dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2020. Diperolehnya opini tersebut berkaitan dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) berbasis komputer yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupat-

en Magelang yang disebut SIMDA Keuangan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak implementasi SIMDA Keuangan terhadap efektivitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang bersifat kuantitatif dengan topik yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis pengaruh kompetensi aparatur, akuntansi akrual, dan implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari yang dilakukan oleh Zalni (2021) menunjukkan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja individu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian juga membuktikan kebenaran dari tujuan sistem informasi akuntansi sebagai alat untuk membantu pengelolaan serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian mengenai SIMDA Keuangan di Magelang dijelaskan bahwa penerapan SIMDA Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Damayanti & Destiningsih, 2020). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan SIMDA Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Magelang. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda, Nurwulan & Septianisa (2018) meneliti mengenai pengaruh implementasi SIMDA Desa, SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap kualitas laporan keuangan (Survey pada pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian Lisda *et al.* (2018) menunjukkan bahwa secara parsial penerapan SIMDA Desa, SPIP, dan kompetensi SDM berpengaruh ter-

hadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SIMDA Desa cukup baik karena hal ini didukung oleh kemudahan akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, infrastruktur, dan aplikasi dasar. Sistem informasi akuntansi terbukti meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Purnomo (2019) meneliti tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sehingga terlihat bagaimana peran sistem informasi akuntansi bagi perkembangan UMKM sangat jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2018) meneliti mengenai pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba di Kota Padang. Namun, secara parsial teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pegawai bagian akuntansi yang bekerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dengan baik. Dengan demikian, perlu bagi suatu organisasi atau lembaga untuk mengetahui bagaimana efektivitas SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangannya agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publiknya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan dan bagaimana kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan tersebut pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penggunaan teknologi informasi akuntansi memberikan peluang baru bagi profesi akuntan. Peluang baru yang mungkin diraih adalah konsultan sistem infor-

masi berbasis komputer, CISA (*Certified Information Systems Auditor*), dan *web trust audit* (Elisabeth, 2019). Pentingnya teknologi informasi akuntansi dalam suatu organisasi telah diakui dalam dunia internasional. Hal ini terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh McIvor, McHugh & Cadden (2018) yang menganalisis bagaimana teknologi internet memiliki fasilitas potensial dalam transparansi organisasi sektor publik di UK. Sistem informasi dalam lembaga pemerintah juga merupakan topik penelitian yang menarik di Amerika Serikat. Teknologi digital mengubah aspek penting organisasi sektor publik yang berkaitan dengan struktur birokrasi formal, akuntabilitas, dan profesional. Di samping itu juga tidak ada akun sistematis dalam studi organisasi tentang perubahan karena digitalisasi khusus untuk sektor publik. Digitalisasi organisasi sektor publik bukan hanya masalah penerapan berbagai teknologi, tetapi tentang pengintegrasian strategi organisasi dan teknologi digital, manajer memerlukan lebih banyak pengetahuan tentang pengembangan bentuk organisasi (Plesner, Justesen & Glerup, 2018).

Sistem informasi akuntansi memberikan peran penting bagi organisasi sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Huy & Phuc (2020) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi memainkan peran penting dalam mempromosikan kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja ekonomi untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan organisasi secara keseluruhan. Teknologi informasi akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna. Informasi keuangan bagi politisi digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Jorge, Jesus & Nogueira (2019) yang meneliti mengenai penggunaan informasi akuntansi oleh politisi mengemukakan bahwa karena kurangnya pengetahuan umum dan kompleksitas informasi akuntansi, politisi di DPR Portugis tidak sering menggunakannya, hanya sesekali.

Penelitian mengenai implementasi SIMDA Keuangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dil-

akukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda *et al.* (2018), Damayanti & Destiningsih (2020), Hardjanto, Kusuma & Murjoko (2019), dan Yanto & Akfir (2019) menggunakan variabel kualitas informasi, sedangkan penelitian ini menggunakan efektivitas pelaporan dan kualitas laporan keuangan sebagai variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kewas, Karamoy & Lambey (2019) hanya dilakukan di satu SKPD dan SKPKD yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Sulawesi Utara sedangkan penelitian ini menggunakan 11 SKPD dan SKPKD di Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif model Miles & Huberman (1992) dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan untuk mengetahui efektivitas pelaporan dan kualitas laporan keuangannya. Miles & Huberman (1992) mengemukakan teknik analisis data kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, *display*/penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Analisis tersebut sesuai dengan penelitian ini. Menurut Miles & Huberman (1992), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini juga dilakukan pada periode terbaru yaitu tahun 2021.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif studi kasus. Sedangkan organisasi sektor publik merupakan objek penelitian yang dipilih dari penelitian ini. Objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang yang belum pernah dilakukan penelitian dengan topik sama sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang, bagaimana kendala dalam pengimplementasian dan bagaimana efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan

sesudah implementasi SIMDA Keuangan tersebut. Penelitian ini disusun dengan sistematika bagian halaman awal adalah judul dan abstrak. Kemudian pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian. Tinjauan pustaka berisi mengenai tinjauan literatur penelitian ini. Metode penelitian berisi mengenai jenis, prosedur, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis dan pembahasan berisi mengenai analisis dan pembahasan dari temuan yang didapatkan dalam penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil kesimpulan dari penelitian ini. Keterbatasan dan saran berisi mengenai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Terakhir yaitu referensi berisi daftar referensi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Menurut Campbell (1989:121), efektivitas merupakan tingkat kemampuan entitas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Campbell (1989:121) menyatakan, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dilakukan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari mekanisme suatu kegiatan dan proses yang dilakukan di lapangan. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan. Kepuasan merupakan ukuran efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa maka kepuasan oleh pengguna semakin tinggi sehingga dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga. Efek-

tivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Sesuatu dapat dikatakan efisien bila output lebih besar daripada input, sebaliknya dikatakan tidak efisien jika input lebih besar daripada output. Oleh karena itu, ketersediaan sarana input penting untuk mengukur efektivitas. Menurut Thenikusuma & Muis (2019), ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mendukung terwujudnya penerapan akuntansi pemerintahan agar berjalan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan dari suatu program akan semakin besar keefektivitas dari suatu unit kerja tersebut (Rahmawati & Suryadi, 2019). Efektivitas pelaporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Defitri (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang berisi pertanggungjawaban entitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Laporan keuangan merupakan indikator utama dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Afifuddin (2019) menjelaskan bahwa efektivitas sistem akuntansi merupakan faktor pendukung dari laporan keuangan. Efisiensi sistem meningkat, maka output produksi yang didapatkan juga ikut meningkat. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan usaha yang efektif agar mendapatkan informasi yang akurat. Usaha untuk mendapatkan informasi harus melewati suatu proses perubahan dengan membuat data menjadi bermakna (Hardjanto *et al.*, 2019). Penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan kinerja perusahaan kepada para pengguna (Agustina & Pratomo, 2019).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Defitri (2018) menyatakan, laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang berisi pertanggungjawaban entitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki. LKPD merupakan laporan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran (Jatmiko, Irawan, Machmuddah & Laras,

2020). Tercapainya efektivitas pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hertanto (2016) menyatakan semakin efektif proses kerja unit organisasi maka semakin besar pula kontribusi suatu program (output) yang dihasilkan terhadap pencapaian maupun sasaran yang telah ditentukan. Kualitas LKPD penting bagi para pengguna. Puspasari & Purnama (2018) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pemakainya. Kualitas laporan keuangan penting bagi pemerintah daerah karena berguna bagi *user* dalam mendukung pengambilan keputusannya. Rahardja, Aini & Hardini (2018) menyatakan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu memanfaatkan teknologi masa kini. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan prasyarat normatif agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah, realisasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kontrol merupakan kegiatan dalam mengelola keuangan oleh pemerintah daerah. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terintegrasi ke dalam suatu sistem dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu unit pemerintahan yang memiliki kewajiban melaporkan laporan keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang terdiri atas entitas akuntansi. Sedangkan unit pemerintahan

yang menggunakan anggaran dan memiliki kewajiban melakukan akuntansi dan membuat laporan keuangan kemudian disusun menjadi satu dengan entitas pelaporan merupakan entitas akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang termasuk dalam entitas pelaporan yaitu pemerintah pusat dan daerah, lembaga/kementerian negara, dan BUN (Bendahara Umum Negara). Sedangkan yang merupakan entitas akuntansi yaitu Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah dan BUD (Bendahara Umum Daerah).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan peraturan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangannya. Basis yang ditetapkan pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu basis akrual. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual. Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah dengan tujuan untuk menerapkan basis akrual pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, pasal 6 terdiri dari dua yaitu Sistem Akuntansi yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD) dan Sistem Akuntansi yang dilaksanakan di Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (SA-PPKD). SKPD merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan untuk kemudian melalui PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Sedangkan SKPKD juga melaksanakan akuntansi sebagai PPKD sekaligus sebagai SKPD. Sehingga sistem akuntansinya terdiri dari SA-PPKD dan Sistem Akuntansi Kon-

solidator yang mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Implementasi SIMDA Keuangan

Menurut BPKP, SIMDA yaitu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan oleh pemerintah daerah. SIMDA Keuangan menurut Yuesti, Adnyana & Pramesti (2020) merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas untuk menerapkan peraturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi, efektif, transparansi, akuntabilitas, dan audit. Sistem yang baik dalam implementasinya dilihat dari penerimaan dan pemahaman pengguna yang merasa puas dengan sistem informasi yang dihasilkan bukan hanya dilihat dari kecanggihannya. Tingkat kepuasan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja penggunaan sistem informasi yang diimplementasikan (Ishak, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Agung & Yuesti (2019) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen). Tujuan penelitian kualitatif salah satunya yaitu untuk melihat efektif tidaknya suatu program atau kegiatan (Raco, 2018). Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang meneliti suatu kasus tertentu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, mendalam, detail, dan komprehensif (Agung & Yuesti, 2019).

Menurut Ahmad, Ekayanti, Nonci & Ramadhan (2020), LKPD dikatakan bagus yaitu bila mendapatkan opini WTP dari BPK. Komitmen yang kuat dibutuhkan untuk mendapatkan opini tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Magelang karena selama empat tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan opini WTP oleh BPK atas LKPD dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2020. Selain itu, juga adanya aksesibilitas data

pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling* dan *snow ball*. Agung & Yuesti (2019) menyatakan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan pengambilan data wawancara kepada orang-orang yang dianggap paling tahu mengenai pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan. Sedangkan untuk responden kuesioner diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LKPD. Agung & Yuesti (2019) menjelaskan bahwa teknik *snow ball* merupakan teknik penentuan sampel mula-mula kecil, kemudian membesar. Teknik ini digunakan karena data diambil melalui wawancara dengan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik tersebut yaitu dari topik kemudian SKPD, bagian keuangan, dan ke kepala subbagian keuangan. Pertanyaan yang diberikan dari hal umum ke hal yang lebih detail mengenai implementasi SIMDA Keuangan dan efektivitas pelaporan keuangan. Informan yang dipilih yaitu Kepala Subbagian Keuangan di SKPD dan BPPKAD selaku SKPKD.

Peneliti mengambil 11 unit SKPD yang dijadikan sampel penelitian ini. Pemilihan SKPD berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu SKPD yang bidang keuangannya telah menggunakan SIMDA Keuangan, SKPD yang berjarak dekat dengan objek penelitian, SKPD yang memiliki kelengkapan data penelitian. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) termasuk SKPD dalam sampel penelitian ini dengan karakteristik khusus sebagai SKPD yang menjalankan fungsi sebagai SKPKD Kabupaten Magelang serta BUD. SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu BPPKAD Kabupaten Magelang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu secara langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati, dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau lembaga untuk memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya (Agung & Yuesti, 2019). Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan kuesioner. Informan dan responden penelitian ini yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan petugas keuangan di SKPKD dan SKPD. Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu dan tidak secara langsung (Agung & Yuesti, 2019). Data sekunder dari penelitian ini yaitu LKPD tahun 2020 diambil dari BPPKAD Kabupaten Magelang.

Prosedur Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu observasi, eksplorasi terfokus, pengumpulan data, dan konfirmasi data. Rahardja, Harahap & Pratiwi (2018) menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kegiatan dan permasalahan yang sedang terjadi pada objek penelitian sebagai pemecahan permasalahan. Observasi dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena adanya kelengkapan data penelitian. Eksplorasi terfokus yaitu menentukan suatu objek untuk sasaran utama penelitian. Objek penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh hal-hal secara mendalam. Peneliti mewawancarai Kepala Sub-

bagian Keuangan di SKPD dan SKPKD. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri informasi melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun karya dari seseorang (Sugiyono, 2019). Dokumen yang dianalisis berbentuk catatan, peraturan, dan kebijakan mengenai SIMDA Keuangan. Di samping itu, dokumentasi juga dilakukan dengan melakukan penelusuran dan telaah LKPD tahun 2020. Lebih jauh, dokumentasi dilakukan dengan penelusuran informasi mengenai efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan melalui kuesioner. Agung & Yuesti (2019) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi responden seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab.

Konfirmasi data dilakukan untuk menguji kebenaran data yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2019), data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang terjadi pada objek penelitian. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2019) merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu dan cara. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji validitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019). Peneliti melakukan konfirmasi dengan informan penelitian yang telah diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara hal yang sama terhadap Kepala Subbagian Keuangan dan petugas keuangan di setiap SKPD yang menjadi sampel penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Alur penelitian deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan proses atau kejadian penjas yang akhirnya ditarik kesimpulan berupa suatu generalisasi dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018). Rijali (2018) menjelaskan bahwa kegiatan mengumpulkan data di

lapangan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, kategorisasi, konseptual, dan deskripsi tidak dapat dipisahkan karena kejadian diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Prosesnya berbentuk siklus dan intraktif, dan keduanya berlangsung secara simultan. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles & Huberman (1992) yang dijelaskan juga oleh Basrowi & Suwandi (2008: 209) tentang teknik analisis data kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, *display*/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data merupakan suatu langkah merangkum dan meringkas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga data yaitu, data hasil kuesioner, data laporan keuangan, dan data hasil wawancara. Data kuesioner dianalisis dengan pengkodean menggunakan skala *likert*. Data laporan keuangan dianalisis dengan meringkas dan menelusuri indikator kualitas laporan keuangan. Data wawancara dianalisis dengan meringkas data dan menelusuri informasi mengenai indikator pelaporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. *Display* data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan penjelasan menggunakan kalimat singkat yang padat dan jelas, menggunakan bagan dan sebagainya. Data hasil kuesioner disajikan dalam sebuah tabel dan dijelaskan menggunakan kata-kata. Hasil analisis data laporan keuangan dan wawancara disajikan ke dalam kalimat sehingga dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan dan bagaimana kualitas laporannya. Sedangkan kesimpulan merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan reduksi dan *display* data. Kesimpulan menjelaskan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan setelah melakukan analisis data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang dimulai sejak tahun 2015. Implementasi ini dilakukan di seluruh SKPD maupun SKPKD

yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang. Namun, ada SKPD yang baru mengimplementasikan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangannya tahun 2017 yaitu di DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dan Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). DPRKP baru mengimplementasikan SIMDA Keuangan tahun 2017 karena dinas ini baru berdiri tahun tersebut. Dinas ini baru ada dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pada tahun 2017. Sedangkan Dispermades mulai mengimplementasikan SIMDA Keuangan tahun 2017 karena di tahun tersebut dinas ini berdiri sendiri sebagai dinas baru. Berikut Gambar 1 merupakan tampilan depan aplikasi SIMDA Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan SIMDA Keuangan karena ketepatan di tahun tersebut adanya kebijakan penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga aplikasi SIMDA Keuangan dari BPKP dipandang lebih meyakinkan dalam membantu pengelolaan keuangan daerah karena BPKP berkedudukan secara langsung di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dari pemeriksaan BPK.

Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang dilakukan secara menyeluruh mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. SIMDA Keuangan sebenarnya bukan aplikasi berbasis web melainkan sebuah aplikasi desktop. Untuk mengakses aplikasi SIMDA Keuangan tidak melalui internet. BPKP pertama kali membuat aplikasi SIMDA Keuangan dengan model ekspor dan impor *file*. Namun ekspor dan impor *file* tersebut memiliki kelemahan di

mana rentan terkena virus dan terjadi *trouble* sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan modifikasi terhadap aplikasi tersebut. Modifikasi yang dilakukan diantaranya, aplikasi tersebut dapat diakses melalui internet dan dapat diinstall di laptop maupun komputer.

Namun di Dinas Pendidikan, penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan terjadi ketidakcocokan antara hasil perhitungan sendiri dan hasil di SIMDA Keuangan. Ketidakcocokan ini terjadi pada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di mana hasil perhitungan di LO (Laporan Operasional) manual Dana BOS dan Dana APBD akan berbeda dengan di LO aplikasi SIMDA Keuangan. Dalam rincian akun-akunnya pun jumlahnya berbeda. Penyebab ketidaksesuaian ini belum dapat diketahui secara pasti.

Aplikasi ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan. Pihak yang mengelola SIMDA Keuangan/yang memiliki akses terhadap aplikasi SIMDA Keuangan diantaranya ada admin dan operator di masing-masing modul SIMDA Keuangan. Modul SIMDA Keuangan terdiri dari modul penganggaran, modul penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan.

Program aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah menggunakan SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan terdiri dari tiga prosedur, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya yang tersistem dan terintegrasi menjadi satu kesatuan (BPKP, 2021). Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh responden dalam penelitian ini, pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan sudah sesuai dengan prosedurnya. Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan prosedur penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan baik di tingkat SKPD maupun SKPKD. Prosedur pertama yang dilakukan dalam mengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu penganggaran.



Gambar 1.

Tampilan Depan Aplikasi SIMDA Keuangan
Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang

Prosedur di aplikasi SIMDA Keuangan telah tersedia menu-menu untuk input data. Petugas Akuntansi tinggal input data yang dibutuhkan. Pertanggungjawaban laporan keuangan juga telah tersedia di aplikasi SIMDA Keuangan.

Prosedur terakhir dalam SIMDA Keuangan yaitu akuntansi dan pelaporan. Dalam akuntansi dan pelaporan dilakukan *posting* jurnal oleh Petugas Akuntansi secara periodik bisa harian, mingguan atau bulanan. Namun, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu triwulan SKPD harus dapat melaporkan menghasilkan laporan keuangan termasuk di dalamnya yaitu LRA (Laporan Realisasi Anggaran) ke BPPKAD. Kemudian oleh BPPKAD dilakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja setiap tiga bulan sekali dengan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Rekonsiliasi tersebut dicatat dalam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) untuk bulan ke-6 atau semester juga membuat

laporan keuangan untuk satu semester dan prognosis. Prognosis merupakan perkiraan belanja dan pendapatan untuk enam bulan ke depan.

Di triwulan keempat atau akhir tahun disusun LKPD. Namun ada SKPD yang terkadang bingung dalam mengelola jurnal. Oleh karena itu, BPPKAD mengumpulkan seluruh SKPD dalam sebuah forum untuk dilakukan pendampingan dalam melakukan jurnal sampai dengan laporan keuangan selesai. Setelah laporan keuangan dari seluruh SKPD digabung menjadi LKPD, kemudian diserahkan ke BPK untuk kemudian dikeluarkannya opini BPK. Setelah itu laporan keuangan diserahkan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk dilakukan pembahasan dan disepakati sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tabel 1 merupakan matrik yang berisi hasil jawaban yang telah dikemukakan oleh informan mengenai bagaimana implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Matrik dibuat untuk

Tabel 1.
Matrik Implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang

Pertanyaan	Jawaban Informan
Tahun Implementasi	Pertama kali memakai aplikasi SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2015. Namun ada SKPD yang mengimplementasikan di tahun 2017 karena baru berdiri di tahun tersebut.
Alasan Implementasi	Diharuskan oleh BPPKAD untuk menggunakan SIMDA Keuangan. SIMDA lebih meyakinkan dan lebih unik. Pelaporan keuangan, penganggaran, dan penatausahaan diharapkan lebih <i>qualified</i> .
Operator SIMDA	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
Bagaimana Implementasinya	Implementasi SIMDA Keuangan telah dilaksanakan secara menyeluruh dari penganggaran, penatausahaan, sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Di Kabupaten Magelang SIMDA Keuangan dimodifikasi dapat diakses melalui internet.
Bagaimana Prosedurnya	Penganggaran: sebelum penganggaran yaitu perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda. Aplikasi perencanaan yang dimiliki Bappeda ditransfer ke aplikasi E-Budgeting. Di E-Budgeting melakukan entri RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari tiap-tiap SKPD lalu dimasukkan di aplikasi SIMDA Keuangan sampai menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Penatausahaan: terdapat prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual. Akuntansi dan Pelaporan: melakukan posting jurnal secara periodik harian, mingguan atau bulanan.

memperjelas dan mempermudah pembaca mengenai penjelasan yang telah diberikan di atas.

Kendala dan Solusi dalam Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan SIMDA Keuangan baik di SKPD maupun SKPKD. Tabel 2 menyajikan mengenai kendala beserta solusi dalam implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang Menggunakan SIMDA Keuangan

Penyusunan LKPD Kabupaten Magelang terdiri dari SA-SKPD dan SA-SKPKD/PPKD. Penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah, di akuntansi komersial diibaratkan sebagai *Home Office* dan *Branch Office*. Di mana SKPD sebagai *Branch Office* sedangkan SKPKD sebagai *Home Office*. Berikut merupakan penjelasan mengenai SA-SKPD dan SA-SKPKD/PPKD di Pemerintah Kabupaten Magelang.

SA-SKPD merupakan proses dalam menyusun laporan keuangan yang dil-

akukan di tingkat SKPD. Unit SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari beberapa SKPD yang berjumlah sekitar 60 SKPD. Diantaranya semua dinas dan kantor camat yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang. Jumlah kecamatan sekitar 20 kecamatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam SA-SKPD diantaranya Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Barang, Petugas Aset, dan PPTK (Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan). SA-PPKD/SKPKD merupakan proses penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPKD/PPKD. Unit yang termasuk PPKD/SKPKD di Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu BPPKAD. Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran (sebagai SKPD), BPPKAD juga menjalankan fungsi sebagai SKPKD (entitas pelaporan).

Pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan dilakukan di lingkup SKPD maupun di SKPKD Pemerintah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh responden dalam penelitian ini, pengelolaan data keuangan menggunakan SIMDA Keuangan dapat membantu dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, aparat pemerintah juga telah memahami cara membuat laporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan.

Tabel 2.

Kendala dan Solusi Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Kendala	Solusi
Kurangunya pengetahuan dari pejabat daerah karena tidak semua berlatar belakang pendidikan akuntansi	Rutin melaksanakan dan mengikuti pelatihan Bimtek yang diadakan oleh BPPKAD.
Banyak daerah di Kabupaten Magelang yang mengalami kesulitan jaringan atau koneksi internet terutama di daerah terpencil.	Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan fasilitas wifi di setiap SKPD yang memiliki kesusahan internet agar jaringan internet menjadi lancar.
Beberapa SKPD ada yang menggunakan lapotop atau komputer digunakan untuk beberapa orang, sehingga ketika akan menggunakan aplikasi SIMDA harus bergantian satu persatu.	Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan fasilitas komputer yang lebih di setiap SKPD sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan lebih cepat.
Sering terjadi <i>error</i> dan <i>lag</i> , sehingga harus <i>log out</i> terlebih dahulu kemudian bisa <i>log in</i> kembali.	Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan membuat pengembangan dalam setiap <i>update</i> versi SIMDA sehingga masalah <i>software</i> dapat teratasi.

Tahap pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan yaitu Petugas Akuntansi melakukan *posting* dari transaksi-transaksi yang ada baik transaksi pendapatan maupun transaksi belanja. Transaksi-transaksi seperti STS (Surat Tanda Setoran), TBB (Tanda Bukti Pembayaran), SPPD (Surat Perintah Pembayaran Daerah) dilakukan verifikasi buktinya kemudian di-*posting*. Kemudian di SIMDA Keuangan LRA yang dihasilkan sudah terformat sebagai LRA bulanan. Sedangkan laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat tersistem dari SIMDA Keuangan sehingga harus dilakukan intervensi langkah-langkah manual untuk entri jurnal seperti pembuatan jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal pembalik. Setelah semua transaksi selesai di akhir tahun/tutup tahun, SIMDA Keuangan akan menghitung jurnal mana yang masuk ke Neraca, LO, dan lain sebagainya. Sehingga petugas hanya tinggal *print* hasilnya. Selain itu, petugas juga mencocokkan hasil dari hitungan manual dengan SIMDA Keuangan. Apabila telah sesuai maka laporan keuangan telah jadi.

Pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang telah lancar dan terintegrasi sehingga hanya sedikit yg mengalami hambatan. Masalah yang muncul diantaranya faktor dari SDM dan masalah *hardware*. Hal ini terjadi di BPPKAD. Bapak Setyawan selaku Kepala Subbagian Keuangan sekaligus Petugas Akuntansi PPKD di BPPKAD menjelaskan adanya SDM yang masih kurang di beberapa SKPD. Namun, tidak semua SKPD kekurangan dalam SDM-nya. Ada beberapa SKPD yang memang sudah memiliki SDM yang bagus. Namun, untuk di kecamatan rata-rata masih kekurangan dalam SDM-nya. Selain itu, juga masalah *hardware*. Masalah pada *hardware* terjadi karena banyaknya aset dari pemerintah daerah dan SDM yang kurang sehingga kinerja dari Pengurus Barang lama. Namun karena dari bidang aset BAR mengalami keterlambatan, maka dari bidang akuntansi harus menunggu.

Efektifitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mage-

lang

Efektivitas dari pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang ini diteliti dengan menggunakan teori dari Campbell (1989) yang mengemukakan bahwa efektivitas diukur dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan yang telah dipilih peneliti, SIMDA Keuangan mempunyai kemampuan operasional yang efektif dalam pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Keberhasilan program dari implementasi SIMDA terhadap efektivitas pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan lebih cepat dan pengoperasiannya lebih mudah. Data dapat diproses secara sistem dan tidak secara manual sehingga laporan keuangan dapat tepat waktu diperiksa oleh BPK untuk mendapatkan opini.

SIMDA Keuangan telah mencapai tujuan dalam pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Sasaran dari penyusunan laporan keuangan mulai dari anggaran sampai pada penatausahaan berpusat di akuntansi dan pelaporannya. Jadi, selama 4 (empat) tahun penggunaan SIMDA Keuangan sangat mendukung pencapaian target-target yang telah ditentukan sebagai SKPD bahwa SIMDA Keuangan dapat mendukung untuk pencapaian opini WTP. Kepuasan terhadap program menurut teori dari Campbell (1989) menjelaskan kepuasan dapat diukur dengan bagaimana keberhasilan dari suatu program dalam mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam penelitian ini, SIMDA Keuangan telah mencapai kepuasan yang tinggi dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kepuasan dari program SIMDA Keuangan yang telah digunakan sudah cukup memadai di Indonesia karena penggunaannya di kabupaten dan kota sudah empat ratus sekian banyaknya dan hampir 80% kabupaten dan kota menggunakan SIMDA Keuangan. Memang

awalnya perlu perbaikan serta pengembangan, namun sampai saat ini SIMDA Keuangan sangat memadai dan memuaskan.

SIMDA Keuangan telah mencapai efektif karena menghasilkan output yang lebih besar daripada input-nya. Tingkat input diantaranya kelengkapan data-data transaksi dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan sedangkan output berupa laporan keuangan yang dihasilkan. Tingkat output yang dihasilkan SIMDA Keuangan lebih besar dari inputnya, karena dengan data yang ada dapat menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan lengkap. Tingkat keluaran yang dihasilkan SIMDA Keuangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BPK yang mensyaratkan segala persoalan dari laporan keuangan data yang disajikan harus lengkap, jadi tidak bisa membuat jurnal atau transaksi tanpa ada bukti fisik yang jelas. Jadi, untuk semua input dan output harus terukur dan tidak dapat dibuat dengan data sendiri. SIMDA Keuangan telah mencapai efektivitas dalam pelaporan keuangannya karena telah memenuhi pelaporan keuangan yang lebih mudah dan tersistematis. SIMDA Keuangan membantu dalam mencapai tujuan penyusunan laporan keuangan akhir yaitu pencapaian berdasarkan dari opini BPK. Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan cukup mendukung dan membantu pemerintah dalam mengelola keuangannya. SIMDA Keuangan juga berkontribusi besar dalam pencapaian secara menyeluruh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangannya dengan dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 3 merupakan matrik yang berisi jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan mengenai bagaimana efektivitas pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan. Matrik bertujuan agar memperjelas dan mempermudah pembaca mengenai penjelasan yang telah diberikan di atas.

Sebelum menggunakan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun laporan keuangannya dengan basis CTA (*Cash Toward Accrual*). Penyusunan

laporan keuangan secara akrual penuh pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 pada saat implementasi SIMDA Keuangan. Sebelum adanya SIMDA Keuangan, laporan keuangan relatif sederhana yaitu LRA, LAK (Laporan Arus Kas), dan Neraca. Sedangkan setelah implementasi SIMDA Keuangan, laporan keuangan bertambah menjadi tujuh. Perbedaannya yaitu setelah implementasi SIMDA Keuangan dalam Neraca terdapat penyusutan yang terdiri dari penyusutan aset tetap sedangkan dulu tidak ada. Selanjutnya, ada tambahan laporan keuangan yaitu LO. LO dalam akuntansi komersial yaitu Laporan Laba Rugi di mana di dalamnya tersaji informasi mengenai pendapatan dan beban-beban operasional. Selain itu juga terdapat LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih) dan LPE (Laporan Perubahan Ekuitas).

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan setelah implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang, Tabel 4 menyajikan perbandingan efektivitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan pelaporan keuangan setelah implementasi SIMDA Keuangan lebih efektif daripada sebelum implementasi SIMDA Keuangan. Hal ini terlihat dari persentase jawaban responden memilih setuju dan sangat setuju lebih banyak setelah implementasi SIMDA Keuangan dari berbagai pernyataan yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan, saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sedang berupaya meningkatkan efektivitas dalam pelaporan keuangannya yaitu dengan mengembangkan SIPD. Namun, karena masih sistem baru sehingga belum dapat diketahui bagaimana pelaporan keuangan menggunakan sistem tersebut. SIPD mulai dijalankan pada tahun 2021 saat ini.

Kualitas Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang dari im-

Tabel 3.
Matrik Efektivitas Pelaporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang

Kriteria/ Informan	Keberhasilan Program	Keberhasilan Sasaran	Kepuasan Terhadap Program	Tingkat input dan Output	Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Informan 1	Proses menggunakan SIMDA lebih cepat, aplikasinya familiar dan pengoperasiannya mudah.	Penggunaan aplikasi SIMDA mendukung dalam mencapai opini WTP.	SIMDA cukup memadai karena penggunaan SIMDA di Kabupaten/kota di Indonesia hampir 80%	Input dan output telah terstruktur.	SIMDA berkontribusi dalam pencapaian tujuan.
Informan 2	keberhasilan SIMDA cukup bagus.	SIMDA mudah dipahami.	cukup puas, namun bila internet sinyalnya bagus belum tentu SIMDA bagus.	Data mengenai laporan keuangan sudah tersedia di SIMDA.	Secara keseluruhan SIMDA baik dan mudah dipahami dipapada SIPD.
Informan 3	secara keseluruhan SIMDA mudah dipahami dipapada SIPD lebih rumit.	SIMDA tepat sasaran dan sesuai dengan yang di input.	SIMDA lebih bagus.	Bila input benar maka hasilnya lengkap.	SIMDA sudah bagus secara keseluruhan.
Informan 4	Bila laporan dari Puskesmas telah jadi baru bisa terintegrasi dengan Pemda.	Sasaran SIMDA bagus.	Sangat puas.	Lengkap dan lancar.	Setiap pemeriksaan dari BPK tidak ada masalah.
Informan 5	SIMDA membantu posting jurnal dan langsung menjadi laporan akuntansi.	SIMDA lebih sistematis, input cepat, dan mempercepat penjurnalan.	Sangat puas.	Menu untuk input di SIMDA sudah terpisahkan.	Cukup memuaskan dibandingkan aplikasi sebelumnya.
Informan 6	Sering banyak selisih, penyerapan sering tidak sesuai.	SIMDA mengalami kerepotan saat nge-link.	Kurang puas karena prosesnya masih ada yang manual.	Tergantung dari SPP.	Masih ada yang secara manual.
Informan 7	Menurut Saya SIMDA efektif karena tidak terlalu banyak tahapan penyusunannya.	SIMDA cukup berhasil dalam menyajikan data untuk kepentingan publik dan pemeriksaan audit, data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.	SIMDA sudah lancar, cukup berhasil programnya, proses pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, dan programnya bagus.	Output SIMDA yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE sudah mencukupi.	Laporan keuangan dapat disajikan sesuai asas laporan keuangan yang revelan, dan akuntabel.

plementasi SIMDA Keuangan ini diteliti dengan menggunakan kriteria karakteristik kualitatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila memiliki informasi yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan maka dikatakan relevan. Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap LKPD Kabupaten Magelang tahun 2020 dan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini, laporan keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan memenuhi kualitas relevan. Laporan keuangan dari proses menggunakan SIMDA Keuangan me-

enuhi kualitas relevan, andal, dapat di pahami, dan dapat dibandingkan karena harus ada kriteria dan standar yang harus dipenuhi. Apabila tidak, maka BPK selaku pemeriksa keuangan pemerintah daerah akan mengeluarkan pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasinya bebas dari kesalahan material, disajikan sesuai apa adanya, dan dapat diverifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Magelang memiliki kualitas andal. Laporan keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keu-

Tabel 3. (lanjutan)
Matrik Efektivitas Pelaporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang

Kriteria/ Informan	Keberhasilan Program	Keberhasilan Sasaran	Kepuasan Terhadap Program	Tingkat Input dan Output	Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Infor- man 8	SIMDA lebih <i>manage</i> karena apabila ada kesalahan menginput masih dapat dibenarkan.	SIMDA lebih tertata dibandingkan dengan aplikasi SIPKD yang belum bisa dipakai karena aplikasi baru.	Sangat puas dibandingkan sebelumnya yang manual.	Data input SIMDA telah lengkap.	Lumayan puas, aplikasinya tidak terlalu ribet, simpel, dan sekali masuk bisa langsung ke belakang.
Infor- man 9	Masih ada revisi dari BPK.	Sudah memenuhi target lima laporan keuangan.	Proses menggunakan SIMDA dapat selesai semua. Jadi bagus banget gitu.	Kalau kelengkapan data selama ini apa yang kita butuhkan bisa di ambil dari SIMDA.	SIMDA itu lebih bagus, selama ini menggunakan SIMDA itu sudah bagus.
Infor- man 10	SIMDA telah dapat sesuai dari perencanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.	SIMDA lebih mudah digunakan oleh petugas yang tidak berlatar belakang akuntansi.	SIMDA dapat dikerjakan menggunakan internet dari Diskominfo sehingga bila dikerjakan di rumah harus menggunakan VPN.	Sudah terpenuhi ..	Masih ada pelaporan yang manual sehingga tidak semua bisa tercover di SIMDA.
Infor- man 11	SIMDA lebih efektif.	Berhasil.	Puas bila dibandingkan dengan manual.	Kelengkapan datanya mendukung.	Cukup baik.

angan pada Pemerintah Kabupaten Magelang juga memiliki kualitas dapat dibandingkan. LKPD Kabupaten Magelang juga memiliki kualitas dapat dipahami karena dapat memenuhi batas pemahaman pengguna dan dapat dipahami oleh pengguna.

Tabel 5 merupakan matrik yang berisi jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan mengenai bagaimana kualitas laporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan. Matrik bertujuan agar memperjelas dan mempermudah pembaca

mengenai penjelasan yang telah diberikan di atas.

Sebelum menggunakan SIMDA Keuangan, laporan keuangan tetap disusun berdasarkan kualitas dari standar yang ditetapkan BPK. Berikut merupakan Tabel 6 berisi perbandingan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan setelah implementasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas

Tabel 4.

Perbandingan Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

No	PERNYATAAN	Sebelum	Sesudah
Keberhasilan Program			
1.	Proses penyusunan laporan keuangan cepat dan akurat.	53%	100%
2.	Pelaporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.	80%	100%
3.	Proses penyusunan laporan keuangan mudah.	60%	93%
Keberhasilan Sasaran			
4.	Informasi yang dihasilkan akurat.	80%	100%
5.	Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.	87%	100%
6.	Informasi yang dihasilkan cepat sehingga berguna dalam mendukung pengambilan keputusan.	67%	93%
Kepuasan Terhadap Program			
7.	Informasi yang dihasilkan membantu proses pekerjaan.	93%	100%
8.	Saya merasa mudah dalam melakukan penyusunan	67%	80%
9.	Saya merasa cocok dengan sistem yang diterapkan	67%	93%
10.	Efektivitas pekerjaan Saya meningkat.	73%	87%
11.	Kinerja Saya dalam penyusunan laporan keuangan	33%	20%
Tingkat input dan output			
12.	Data laporan dapat diperoleh secara lengkap.	73%	100%
13.	Data sesuai dengan kebutuhan untuk memantau	93%	100%
14.	Hasil informasi yang dihasilkan mencerminkan keadaan	93%	100%
15.	Transaksi atau peristiwa lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi anggaran.	87%	100%
Pencapaian Tujuan Menyeluruh			
16.	Pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan Kemendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	93%	100%
17.	Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan format dalam Standar Akuntansi Pemerintah.	93%	100%
18.	Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan.	93%	100%
19.	Kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah meningkat.	80%	87%
Jumlah		77%	92%

Tabel 5.
Matrik Kualitas Laporan Keuangan Menggunakan SIMDA Keuangan

Kriteria/ Informan	Relevan	Andal	Dapat dibandingkan	Dapat dipahami
Informan 1	Relevan karena harus memenuhi kriteria laporan.	Laporan Keuangan andal.	Laporan Keuangan dapat di bandingkan.	Laporan Keuangan dapat di Pahami.
Informan 2	Kualitas Laporan Keuangan relevan	Andal.	Bisa di bandingkan bila sama-sama menggunakan SIMDA.	Dapat dipahami.
Informan 3	Laporan Keuangan diteliti di DPKAD telah sesuai atau tidak.	sudah.	Bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Dapat dipahami.
Informan 4	Relevan terbukti dengan diperolehnya opini WTP dalam lima tahun berturut-turut.	Tidak ada masalah.	Dapat dibandingkan dengan aplikasi lain	Mudah dipahami.
Informan 5	Data dapat disajikan secara efektif, efisien.	Menurut kami yang terbaik.	SIMDA unggul bila dibandingkan dengan sebelumnya.	Dapat dipahami.
Informan 6	Laporan keuangan menggunakan SIMDA dapat digunakan untuk mengambil keputusan.	Andal karena sangat membantu.	Selama memakai sistem yang sama maka keandalan dan lainnyasama.	Dapat dipahami dan telah dijelaskan di CALK.
Informan 7	Sesuai yang di atur dalam Perbug tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.	Cukup dalam menyajikan Laporan Keuangan yang relevan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.	Tidak dapat membandingkan dengan yang sebelumnya.	Dapat dipahami karena tertuang dalam CALK.
Informan 8	Relevan.	SIMDA bisa dikatakan bagus.	Tidak dapat dibandingkan bila masih dalam satu sistem.	Orang yang mengetahui akuntansi dapat memahami.
Informan 9	Relevan dibuktikan dengan opini WTP.	Andal	Tidak dapat dibandingkan karena item berbeda.	Dapat dipahami.
Informan 10	Relevan dan informasi banyak disampaikan di CALK.	Dapat diandalkan.	Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Bisa.
Informan 11	Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.	Andal namun masih harus dilakukan pengecekan manual.	Bisa karena terdapat laporan tahun sebelumnya.	Bisa.

daripada sebelum implementasi SIMDA Keuangan. Persentase jawaban responden memilih setuju dan sangat setuju lebih banyak setelah implementasi SIMDA Keuangan dari berbagai pernyataan yang diberikan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LPE, LO, LAK, LPSAL, CALK (Catatan atas Laporan Keuangan). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan dalam penelitian ini, laporan keuangan yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut informan 1, LKPD Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila tidak sesuai maka laporan keuangan tersebut tidak diterima oleh BPK. Hal ini didukung dengan Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Magelang selama lima tahun berturut-turut dari TA 2016-2020. Dengan demikian, pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan mampu

mendukung pelaporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik dan



Gambar 2.
Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Magelang TA 2020

Sumber: BPPKAD

Tabel 6.
Perbandingan Kualitas Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

No	PERNYATAAN	Sebelum	Sesudah
Relevan			
1.	Informasi yang dihasilkan disajikan secara lengkap dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan.	73%	100%
2.	Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis kegiatan lebih lanjut.	80%	100%
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.	87%	100%
Andal			
4.	Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan material.	47%	87%
5.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan wajar sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.	80%	93%
6.	Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.	87%	100%
Dapat Dibandingkan			
7.	Informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	87%	100%
8.	Informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan LKPD lain.	73%	73%
Dapat Dipahami			
9.	Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.	80%	100%
10.	Laporan keuangan yang dihasilkan disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	73%	87%
Jumlah		75%	94%

berkualitas. Gambar 2 menyajikan opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Magelang TA 2020.

Hasil studi dokumentasi terhadap LKPD Kabupaten Magelang 2020 yaitu format LRA Pemerintah Kabupaten Magelang yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Pemerintah Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA Keuangan juga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. LPE yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan. LO Pemerintah Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan juga telah memenuhi kualitas yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LAK pada Pemerintah Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan telah memenuhi kualitas yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. LPSAL Pemerintah Kabupaten Magelang yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan juga telah memenuhi kualitas yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan dalam pelaporan keuangannya. Implementasi SIMDA Keuangan telah menyeluruh mulai dari prosedur penganggaran, prosedur penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan.

Hambatan dalam implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang diantaranya kurangnya pengetahuan SDM. Hal ini karena petugas tidak semua berlatar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, banyak SKPD yang mengalami kesulitan dan kebingungan di awal implementasi SIMDA Keuangan. Selanjutnya yaitu koneksi/jaringan internet. Hal ini karena SIMDA Keuangan dioperasikan menggunakan internet dan pemakaian internet yang dilakukan di seluruh SKPD menyebabkan jaringan sering *error*. Selain itu, juga banyaknya SKPD yang berada di dae-

rah terpencil yang memang sulit mendapatkan jaringan/koneksi internet. Selanjutnya yaitu *hardware*/perangkat keras. Perangkat keras menjadi penghambat dalam pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan karena di Pemerintah Kabupaten Magelang tidak semua SKPD memiliki laptop atau komputer yang mencukupi. Ada beberapa SKPD yang hanya memiliki satu laptop atau komputer sehingga pemakaiannya bergantian. Selanjutnya yaitu *software*/perangkat lunak. Hal ini terjadi karena aplikasi SIMDA Keuangan sering *lag* sehingga keluar sendiri dan harus masuk kembali. Selain itu juga SIMDA Keuangan memiliki beberapa kelemahan diantaranya dari aset tidak dapat *link* sampai ke akhir sehingga harus melakukan input ulang. Selain itu, SIMDA Keuangan juga mengalami ketidakcocokan antara perhitungan manual dan perhitungan menggunakan SIMDA Keuangan.

Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang terbukti meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daripada sebelum menggunakan SIMDA Keuangan. Selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA Keuangan, dapat disimpulkan kualitas LKPD Kabupaten Magelang dengan adanya implementasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas dibandingkan sebelum implementasi SIMDA Keuangan. Selain itu, LKPD Kabupaten Magelang yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini yaitu terbatasnya informasi mengenai sistem informasi yang digunakan pada tahun 2020 karena sistem yang digunakan masih baru sehingga informan tidak dapat memberikan informasi secara detail. Terbatasnya informasi mengenai sistem informasi sebelum adanya SIMDA Keuangan karena ada beberapa informan penelitian yang baru mulai bekerja saat diterapkannya SIMDA Keuangan sehingga informasi mengenai sebelum adanya SIMDA Keuangan yaitu sebelum tahun 2015 tidak diketahui. Peneliti hanya dapat menggambarkan sesuai dengan informasi yang ada.

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggali informasi yang lengkap mengenai pelaporan keuangan dengan sistem yang baru di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2020 dan seterusnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperdalam mengenai kebutuhan sumber daya dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah berbasis teknologi dikarenakan masih banyak petugas akuntansi pemerintah yang belum paham mengenai teknologi akuntansi dan latar belakang pendidikan yang juga tidak berasal dari bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aben, T.A.E., van der Valk, W., Roehrich, J.K., & Selviaridis, K. (2021). Managing information asymmetry in public-private relationships undergoing a digital transformation: The role of contractual and relational governance. *International Journal Operations and Production Management*, IJOPM-09-2020-0675.
- Agung, A.A.P., & Yuesti, A. (2019). *Metode penelitian bisnis kuantitatif dan kualitatif*. Bali: CV. Noah Aletheia
- Agustina, R.D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh *fraud* pentagon dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmia MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, 3(1), 44-62.
- Ahmad, J., Ekayanti, A., Nonci, N., & Ramadhan, M.R. (2020). Government agility and management information systems: Study of regional government financial report. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7 (10), 315-322.
- Anggraini, P.N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(2), 16-26.
- Andjani, A., Ratnamulyani, I.A., & Kusumadinata, A.A. (2018). Penggunaan media komunikasi Whatsapp terhadap efektivitas kinerja karyawan. *Jurnal Komunikatio*, 4(1), 41-50.
- Apridiyanti, A., Suharman, H., & Ardianto, Z. (2020). Succesfull implementation of information systems in public sector organizations. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3 (1), 40.
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik (Studi empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-14.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD*. Diakses dari www.jateng.bpk.go.id.
- BPPKAD Kabupaten Magelang. (2021). LKPD 2020. Diakses dari www.sibata.magelangkab.go.id.
- BPKP. (2021). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Diakses dari www.bpkp.go.id.
- Campbell. (1989). *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Damayanti, H., & Destiningsih, R. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan dalam pengelolaan data keuangan pada organisasi pemerintah daerah (Studi kasus pada BPBD Kabupaten Magelang). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 175-186.
- Dewi, N.C., & Mariska, S. (2018). Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 63-70.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. (1991). Stewardship theory or agency theory, CEO governance and shareholder returns, Australian. *Journal of Management*, 16, 49-46
- Elisabeth, D.M. (2019). Kajian terhadap peranan teknologi informasi dalam perkembangan audit komputerisasi (Studi kajian teoritis). *Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 41.

- Handayani, F., & Erlina, E.S.R. (2020). Actors that affect the quality of the government's financial statements in Medan. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 3(1), 139-152.
- Hardjanto, K., Kusuma, M.P., & Murjoko. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berbasis akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 11-20.
- Huy, P.Q., & Phuc, V.K. (2020). The impact of public sector scorecard adoption on the effectiveness of accounting information systems towards the sustainable performance in public sector. *Cogent Business and Management*, 7: 1717718.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Ishak, P. (2019). Penerapan SIMDA dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jasa informasi akuntansi. *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, 15 (1), 55-67.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factor affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 89-89.
- Jorge, S., Jesus, M.A.J., & Nogueira, S.P. (2019). The use of budgetary and financial information by politicians in parliament: A case study. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(4), 539-557.
- Kewas, A.M.D., Karamoy, H., & Lambey, L. (2019). Analisis kendala pengimplementasian pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 10(2), 108.
- Kring, W.N. & Grimes, W. (2019). Leaving the nest: The rise of regional financial arrangements and the future of global governance. *Development and Change*, 50(1), 72-95.
- Lestari, N.L.W.T., & Dewi, N.N.S.R.T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170-178.
- Liou, K.T., & Hu, Q. (2018). Technology development and public organization management. *International Journal of Organization Theory & Behavior*, 22(2), 114-122.
- Lisda, R., Nurwulan, L.L., & Septianisa, L. (2018, 8-9 Maret). *Pengaruh implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan (Survey pada pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat)*. Paper dipresentasikan pada acara Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018, STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.
- Mclvor, R., McHugh, M., & Cadden, C. (2018). Internet technologist: Supporting transparency in the public sector. *International Journal of Public Sector Management*, 15(3), 170-187.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 *Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar*

- Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Plesner, U., Justesen, L., & Glerup, C. (2018). The transformation of work in digitized public sector organizations. *Journal of Organization Change Management*, JOCM-06-2017-0257.
- Prastika, N.E., & Purnomo, D.E. (2019) Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. *Jurnal Pekalongan Kota*, 7.
- Puspasari, O.R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Raco, J.R. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rahardja, U., Aini, Q., & Hardini, M. (2018). Penerapan *software* akuntansi *online* sebagai penunjang pencatatan laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA*, 8(2), 176.
- Rahardja, U., Harahap, E.P., & Pratiwi, S. (2018). Pemanfaatan *mailchimp* sebagai tren penyebaran informasi pembayaran bagi mahasiswa di perguruan tinggi. *Technomedia Journal (TMJ)*, 2(2), 41-53.
- Rahmawati, M., & Suryadi, E. (2019). Guru sebagai fasilitator dan efektivitas belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 49-54.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), 81.
- Saerang, D.P.E., Wokas, H.R.N., Kumaat, R.J., & Datu, C. (2019). Effect of understanding financial management, regional financial accounting systems, effectiveness of internal control, and commitment towards financial performance of North Sulawesi Province. *Accountability*, 8(1), 51-59.
- Simpson, S.N.Y., Tetteh, L.A., Boateng, C.A. (2020). Exploring the socio-cultural factors in the implementation of public financial management information system in Ghana. *Journal of Accounting and Organizational Change*, ISSN: 1832-5912.
- Sugiyantari, D., Titisari, & P. Sumani. (2018). Efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan *Cloud* pada Pemerintah Kabupaten Jember. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 106-118.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Sumtaky, M., Chandrarin, G., & Sanusi, A. (2018). Effect of elements of regional financial management towards SKPD regency/city performance and its implication on public service. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 4(2), 73-86.
- Theni, K., & Muis, N.M. (2019). The effect of implementation regional financial accounting system, human resource competency and infrastructure facilities to the quality of financial report. *SSRN Electronic Journal*.
- Thoa, D.T.K., & Nhi, V.V. (2021). Improving the quality of the financial accounting information through strengthening of the financial autonomy at public organizations. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, JABES-06-2020-0059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Wanti, S.I., & Susilo, G.F.A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan dalam pengelolaan data keuangan pada organisasi pemerintah daerah (Studi kasus pada BPBD Kabupaten Magelang). *Accounting Global Journal*, 4 (2), 114-123.
- Widajatun, V., & Kristiastuti, F. (2020). The

- effect of regional financial supervision, accountability and transparency of regional financial management on local government performance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2966-2974
- Yanto, E. & Afkir. (2019). Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1), 16.
- Yuesti, A., Adnyana, I.M.D., Pramesti, I.G.A.A. (2020). Management information systems and the quality of financial statements in local government. *Journal Public Affairs*, 2462.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Zalni. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur, akuntansi akrual dan implementasi simda terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Kendari. *Jurnal Ekonomix*, 9(1).